

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menekannya dalam agenda tahunan pemerintah. Bahkan menjadi *masterplan* perencanaan pembangunan dalam jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan kompleks serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Istilah kemiskinan adalah ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kemakmuran ekonomi sesuai dengan standar hidup di suatu wilayah tertentu.

Pembangunan nasional harus mampu meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk. Pembangunan nasional harus mampu mengangkat kehidupan manusia yang berada pada tingkatan paling bawah (penduduk miskin) ke tingkat yang lebih baik dari waktu ke waktu. Hal ini penting sebab semakin besar jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah akan menjadi tinggi beban pembangunan. Suatu pembangunan dikatakan berhasil bila jumlah dan persentase penduduk miskin dapat diminimalkan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan

dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh Negara-negara lain, seperti, Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia.

Seperti halnya kondisi kemiskinan di Indonesia, jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia walaupun sedikit berfluktuasi namun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut cenderung mengalami penurunan, namun jumlah dan persentase tersebut masih relatif tinggi, terutama jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya yang mempunyai jumlah dan persentase penduduk miskin yang relatif kecil. Meskipun jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun harus tetap menjadi prioritas pemerintah untuk terus mengupayakan penurunannya sebab masih memiliki persentase yang tinggi dibandingkan dengan negara lain yang memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang rendah. Berikut data jumlah penduduk miskin di Indonesia

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (orang)
2014	28.280.010
2015	28.592.790
2016	28.005.390
2017	27.771.220
2018	25.949.800

Sumber :Persentase Penduduk Miskin, BPS, Berbagai Sumber

Dari Tabel 1.1, kemiskinan Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 kemiskinan sebesar 28.59 juta orang, sedangkan di tahun 2018 kemiskinan Indonesia turun menjadi 25.94 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, ada sejumlah faktor yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2017:

1. **Tingkat inflasi yang relatif rendah yaitu sebesar 1,34%**
2. **Harga Kebutuhan pokok masyarakat (beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam) mengalami penurunan. Rata-rata harga beras turun sebesar 1.21% yaitu dari Rp 13.301 per kg menjadi Rp 13.140 per kg. Cabai merah mengalami penurunan sebesar 14,06% dari Rp.45,554 per kg menjadi Rp 39,151 per kg. Adapun cabai rawit mengalami penurunan sebesar 13,77% dan telur ayam mengalami penurunan sebesar 0,56%.**
3. **Rata-rata upah buruh tani naik sebesar 1,42% dari Rp 47.559 menjadi Rp 48,235 selain itu upah buruh bangunan juga naik sebesar 1,23% dari Rp 81,481 menjadi Rp 82, 480.¹**

Menurut Suhariyanto dalam berita Kontan.co.id mengatakan bahwa: “Penurunan tingkat kemiskinan selama Maret-September 2017 terjadi karena terkendalinya inflasi, yaitu hanya sebesar 1,45%. Selain itu penurunan tingkat kemiskinan tersebut juga di dorong oleh kenaikan upah buruh tani baik nominal maupun riil, masing-masing 1,5% dan 1,05%”². Oleh karena inflasi Indonesia dikendalikan oleh pemerintah baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter sehingga dapat menstabilkan harga-harga barang yang tahap berikutnya meningkatkan daya beli masyarakat dan akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Menurut M. Suparmoko “Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro. Perekonomian yang tumbuh akan mampu memberikan kesejahteraan

¹Suhariyanto, **Jumlah Penduduk Miskin Turun, ini penyebabnya**, <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2697185/jumlah-penduduk-miskin-turun-ini-penyebabnya>, 2017 (Diakses tanggal 23 Oktober 2019)

²Suhariyanto, **Penduduk Miskin Susut Tercepat di September 2017**, <http://www.google.com/amp/kontan/co.id/news/penduduk-miskin-susut-tercepat-di-september=2017>, 2018 (Diakses tanggal 23 Oktober 2019)

ekonomi yang lebih baik bagi penduduk negara yang bersangkutan”.³ Apabila perekonomian suatu negara tumbuh, maka akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di wilayahnya. Tentunya jika pertumbuhan ekonomi tinggi, maka penurunan kemiskinan juga akan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang erat, pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan tolak ukur kinerja perekonomian suatu wilayah, akan tetapi belum pasti tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingginya tingkat kesejahteraan rakyatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berarti bagi pengetasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

Boediono dalam Seri Jefri Adil Waruwu menjelaskan bahwa :

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu: sisi totalnya (GDP) dan jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk dilain pihak. Jadi proses kenaikan output perkapita, tidak bisa tidak, harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan yang lengkap haruslah bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan sejumlah penduduk. Dengan kata lain, teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP total, dan teori mengenai pertumbuhan penduduk.⁴

Tabel 1.2 Persentase Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2014– 2018

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2014	5,01
2015	4,88
2016	5,03
2017	5,07
2018	5,17

Sumber: *Persentase Pertumbuhan Ekonomi, BPS, Berbagai Sumber*

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 sebesar 4,88 persen merupakan yang terendah lima tahun terakhir. Kepala BPS Suryamin menjelaskan bahwa ada beberapa faktor rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015:

³M. Suparmoko, E. Sofilda, **Pengantar Ekonomi Makro**, Edisi 5, Jakarta. IN MEDIA, 2016, hal.121

⁴Seri Jefri Adil Waruwu, **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014**, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2016, hal.4 (skripsi diterbitkan)

“perlambatan ekonomi disebabkan dari sisi produksi maupun sisi konsumsi. Dari sisi produksi, ada empat penyebab utama perlambatan ekonomikuartal I-2015. Pertama, produksi pangan menurun akibat mundurnya periode tanam. Kedua, produksi minyak mentah dan batu bara mengalami kontraksi sehingga industri kilang minyak juga tumbuh negatif. Ketiga, distribusi perdagangan melambat karena menurunnya pasokan barang impor (barang modal, bahan baku/penolong, serta barang konsumsi). BPS mencatat impor pada kuartal I-2015 turun 2,2% (YoY), dan turun 9,98% (QtQ). Keempat, kinerja konstruksi terkait dengan terlambatnya realisasi belanja infrastruktur. Sementara itu dari sisi pengeluaran ada 6 penyebab perlambatan ekonomi kuartal I-2015. Pertama, semua komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) melambat. Kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah yang melambat. Ketiga, ekspor barang terkontraksi karena turunnya harga komoditas serta melambatnya perekonomian negara mitra dagang utama Indonesia. Keempat, ekspor jasa terkontraksi karena melambatnya pertumbuhan jumlah wisman dan turunnya rata-rata pengeluaran wisman.”⁵

Vice President Chief Economist BNI Ryan Kiryanto mengatakan turunnya tingkat konsumsi di tahun 2015 karena banyak kepala rumah tangga yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).⁶Dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran. Hal ini dapat kita lihat dengan naiknya tingkat pengangguran di tahun 2015 6,18%. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri.

⁵Suryamin, Kompas, **Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2015 Melambat ini Penyebabnya**, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2015/05/05/135327526/Pertumbuhan.Ekonomi.Kuartal.I-2015.Melambat.Ini.penyebabnya,2015> (Diakses tanggal 27 Oktober 2019)

⁶Ryan Kiryanto, Okezone, <https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2016/01/15/20/1289406/sektor-konsumsi-penyebab-rendahnya-ekonomi-2015,2016> (Diakses tanggal 26 Januari 2020)

Pada masa sekarang usaha-usaha mengurangi pengangguran adalah dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan secara matang.

Tabel 1.3 Persentase Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2014-2018

Tahun	Pengangguran Terbuka (%)
2014	5,94
2015	6,18
2016	5,61
2017	5,50
2018	5,34

Sumber : Persentase pengangguran Terbuka, BPS, Berbagai Sumber

Secara umum penyebab meningkatnya pengangguran adalah karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Bagaimana tidak, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan akhirnya menjadi miskin. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan karena adanya perlambatan ekonomi sehingga tingkat permintaan terhadap barang menurun yang kemudian berimbas kepada perusahaan mengalami kebangkrutan dan tidak mampu menanggung upah pegawai/pekerja sehingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang terjadi di tahun 2015.

Suhariyanto mengatakan, “penurunan angka pengangguran di Indonesia sejak tahun 2016 disebabkan karena adanya perbaikan ekonomi. Dengan adanya perbaikan ekonomi, maka permintaan industri terhadap sumber daya atau angkatan kerja produktif mengalami peningkatan.”⁷

Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang paling

⁷Suhariyanto, Kompas, **Angka Pengangguran Turun Jadi 7,03 Juta Orang**, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2016/11/07/162203926/angka.pengangguran.turun.jadi.7.03.juta.orang>, 2016 (Diakses tanggal 2 November 2019)

sering dibicarakan dalam perdebatan politik oleh para politisi. Semakin menurunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena mereka tidak memiliki pendapatan.

Perdebatan terkait dengan upah minimum terhadap kemiskinan masih menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas. Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸ Sehingga pemerintah terus melakukan kebijakan di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perbaikan terhadap upah minimum dan terus meningkatkannya berdasarkan jumlah, tuntutan, kebutuhan hidup masyarakat.

Berikut ini tingkat upah minimum di Indonesia

Tabel 1.4 Upah Minimum di Indonesia Tahun 2014-2018

Tahun	Upah Minimum (Rupiah)
2014	Rp. 1.584.391
2015	Rp. 1.790.342
2016	Rp. 1.997.819
2017	Rp. 2.137.198
2018	Rp. 2.264.676

Sumber: Upah Minimum Regional/Provinsi, BPS, Berbagai Sumber

Upah adalah imbalan yang diterima oleh buruh/pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Pemerintah di dalam mengambil keputusan untuk menetapkan upah minimum memperhitungkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

⁸Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan

Tahun 2018 upah minimum meningkat sekitar 8,71% dimana menggunakan formulasi berdasarkan hasil penambahan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2017 dikalikan tingkat inflasi nasional 3,72% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok sebesar 4,99%. Pada tahun 2015 dapat kita lihat bahwa tingkat upah minimum meningkat tetapi jumlah kemiskinan meningkat, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyatakan bahwa: “kontribusi kenaikan harga pangan jauh lebih besar pengaruhnya dibandingkan peningkatan jumlah upah.”⁹ Berdasarkan fenomena dan Susenas bahwa peningkatan upah minimum yang terjadi pada tahun 2015 tidak selamanya menurunkan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2000-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas masalah penelitian di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018?
2. Bagaimanakah pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018?
3. Bagaimanakah pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disertai dengan tujuan penelitian, yaitu :

⁹Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), **Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin**, <https://www.google.com/amp/s/kompas.com/amp/berita/2015/16/peningkatan-jumlah-penduduk-miskin/09/>, 2015. (Diakses 19 januari 2020)

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teori, minimal menguji teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis, secara praktis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan ekonomi makro. Pemerintah mendapatkan informasi yang memadai dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.
 - b. Bagi penduduk miskin, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan untuk keluar dari masalah kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan hidup mereka, terutama jika kemiskinan itu bersumber dari diri mereka sendiri.
 - c. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan menerapkan ilmu-ilmu yang telah di dapat dari bangku kuliah.

- d. Bagi Fakultas, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan perbandingan bagi pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena yang seringkali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan juga seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat

kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi.

Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing dan Dame Eshter menjelaskan bahwa “masalah kemiskinan bukanlah hal baru, karena telah timbul sejak lama dan keadaan miskin itu merupakan sesuatu masalah yang akan selalu ada dan terus ada dalam berbagai negara termasuk di Indonesia”.¹⁰

Berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, tetapi statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu rantai dalam lingkaran kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan akan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan pekerjaan perumahan, air bersih pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Dengan kata lain, kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kemiskinan absolut, dimana pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

¹⁰Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing dan Dame Esther, **Ekonomi Indonesia**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2012, hal. 76.

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi.

Menurut M. Kuncoro Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan yang lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹¹

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah gariskemiskinan.

2.1.3 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang- kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

¹¹M. Kuncoro, **Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan**, Edisi Ketiga, Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2003, hal. 123

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi di perkotaan dan jenis komoditi di perdesaan. Rumus perhitungan garis kemiskinan (BPS) adalah:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Keterangan : GK = Garis Kemiskinan,

 GKM = Garis Kemiskinan Makanan,

 GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan.

BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan batas garis kemiskinan setara dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari yang akan disetarakan dengan rupiah. Selanjutnya, 2.100 kilo kalori perkapita perhari akan disetarakan dengan rupiah ketika pengukuran kemiskinan dilakukan di tiap daerah/propinsi dengan menyesuaikan harga yang berlaku pada suatu daerah/propinsi tertentu. Pengukuran kemiskinan pada daerah/propinsi akan menggunakan satuan rupiah dengan menyesuaikan harga pada tiap-tiap daerah tertentu. Misalnya garis kemiskinan di Propinsi DKI Jakarta pada bulan maret 2014 sebesar 393,98 ribu orang berbeda dengan garis kemiskinan di Propinsi D.I. Yogyakarta sebesar 544,87 ribu orang.

2.1.4 Teknik Perhitungan GKM (Garis Kemiskinan Makanan)

1. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*refence population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan(GKNM).

2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari.

Rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan adalah :

1. Keterangan : GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori), P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j, Q_{jk} = rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j, V_{jk} = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j, j = daerah (perkotaan atau perdesaan). Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK_j} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

2. Keterangan : kalori dari komoditi k di daerah j, HK_j = harga rata-rata kalori di daerah j.

$$F_j = \overline{HK_j} \times 2100$$

3. Keterangan : F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari.

2.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) dengan rumus perhitungan :

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \frac{z - y_i}{z} a$$

- Keterangan : $a = 0$, z = garis kemiskinan, y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan

penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$, q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, n =jumlah penduduk.

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

a. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup layak.

Menurut Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing dan Dame Ester “Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup”.¹² Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

¹²Ibid, hal . 77

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan (*poverty line*) yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kondisi ini disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan.¹³

Beberapa tolak ukur kemiskinan di Indonesia yang sudah banyak digunakan saat ini adalah:

- 1) Rasio barang dan jasa yang dikonsumsi,
- 2) Rasio pendapatan yang digunakan untuk konsumsi makanan,
- 3) Pendapatan setara harga beras,
- 4) Pemenuhan kebutuhan pokok.¹⁴

Tabel 2.1 Batas Kemiskinan Kota dan Desa (Kg) di Indonesia.

¹³**Ibid**, hal. 77

¹⁴Dara P. Agustin, **Tolak Ukur Kemiskinan di Indonesia**, www.radarplanologi.com, juni.2016, (Diakses 3 November 2019)

Batas Kemiskinan	Kota (kg/kapita/tahun)	Desa (kg/kapita/tahun)
Miskin	480	320
Sangat Miskin	360	240
Melarat	270	180

Sumber : Siahaan dan Purba, 2003

Standar internasional yang biasa dipakai Bank Dunia adalah pendapatan kurang dari dua dollar AS per hari, tetapi ada juga yang memakai satu dollar perhari.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dikatakan bertumbuh adalah apabila jumlah produksi barang dan jasa dalam perekonomian tersebut mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Produksi total barang dan jasa selama satu tahun tertentu disebut namanya output nasional atau pendapatan nasional atau disebut dengan istilah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan output nasional atau pendapatan nasional suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan cara membandingkan PDB riil satu tahun yang sedang berjalan dengan PDB riil satu tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persen. Demikian juga secara regional, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB riil satu tahun berjalan dengan PDRB riil satu tahun sebelumnya dinyatakan dalam persen.

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor

apa saja yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk.

Karl E. Case & Ray C. Fair mengatakan bahwa :

Pertumbuhan ekonomi terjadi bila (1) masyarakat mendapatkan lebih banyak sumberdaya, atau (2) masyarakat menemukan cara penggunaan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien. Agar pertumbuhan ekonomi menaikkan setandar hidup, tingkat pertumbuhan harus lebih tingkat kenaikan penduduk. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP riil per kapita.¹⁵

2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Robert Solow

Dalam teorinya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia atau kenaikan penawaran tenaga kerja, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Maka pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Solow mengemukakan hasil estimasi pertumbuhan PDB sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pertumbuhan modal dan tenaga kerja dengan *technical progress* sebagai penyebab pertumbuhan output.
2. Meningkatnya populasi sebenarnya mengurangi PDB perkapita meski hal tersebut meningkatkan PDB.
3. Lebih banyak pekerja berarti lebih banyak output, namun tidak meningkat secara proporsional.
4. Yang mengestimasi bahwa setiap poin persentase pertumbuhan angkatan kerja menyebabkan 1- 0 poin persentase kenaikan output.¹⁶

¹⁵Karl E. Case, & Ray C.Fair. **Prinsip-prinsip Ekonomi Makro**, Edisi ke-5, Jakarta. PT INDEKS, Kelompok Gramedia 2004. hal. 325

¹⁶ Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz, **Makroekonomi**, edisi kedelapan, Jakarta: Media Global Edukasi, tahun 2014, hal. 62

2.2.3 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu :

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu perekonomian dalam satu tahun yang dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

2. Produk Domestik Bruto Per Kapita/Pendapatan PerKapita

Produk Domestik Bruto Per Kapita atau Produk Regional Bruto (PDRB) per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih cepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara dari pada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional maupun PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara manapun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

2.3 Pengangguran

Pengangguran sering digunakan sebagai istilah untuk menyatakan orang yang tidak bekerja sama sekali. Pengertian ini adalah kurang tepat sebab tidak semua orang tidak bekerja disebut sebagai penganggur. Beberapa kelompok masyarakat seperti para ibu rumah tangga dengan alasan harus mengasuh anak dan mengurus keluarga, anak-anak muda yang harus sekolah atau

kuliah dahulu, dan anak-anak orang kaya yang sudah memiliki kekayaan yang lebih dari cukup atau kemungkinan gajinya lebih kecil dari yang diharapkan biasanya tidak mau atau tidak sedang mencari pekerjaan. Oleh karena itu, kendatipun mereka tidak bekerja namun tidak disebut sebagai penganggur.

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi seiring mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurut Sadono Sukirno pengangguran dapat digolongkan berdasarkan cirinya, yaitu:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karena itu dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

3. Setengah Menganggur

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

4. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabila dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.¹⁷

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran terbuka terdiri dari :

- a) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
- c) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.¹⁸

Masalah pengangguran dapat menimbulkan dampak buruk atau menimbulkan biaya sosial, yaitu (1) terganggunya stabilitas perekonomian karena pengangguran menimbulkan melemahnya permintaan agregat dan penawaran agregat, dan (2) terganggunya stabilitas sosial politik karena

¹⁷Sadono Sukirno, **Teori Pengantar Makroekonomi**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, tahun 2018, hal.330-331

¹⁸BPS, **Tenaga Kerja**, <http://www.bps.go.id> (Diakses 11 November 2019)

pengangguran dapat meningkatkan ketimpangan dan kecemburuan sosial tindakan kriminalitas baik berupa kejahatan pencurian, perampokan, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan berbagai kegiatan ekonomi ilegal lainnya, bahkan dapat menimbulkan tidak lancarnya sistem demokrasi karena *money politic* lebih dominan.

2.4 Upah Minimum

Upah minimum di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Defenisi upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaringan pengaman. Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi.
2. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan

barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin - mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (*substitution effect*).

Defenisi upah pada UU No.13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa upah adalah pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental sebagai imbalan dari para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu yang di dalamnya berupa perjanjian kerja atau kesepakatan kedua belah pihak termasuk tunjangan bagi pekerja, dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Menurut Mira Cahyaningtyas dalam berita gadjian.com faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat upah adalah:

1. Biaya Hidup

Perbedaan tingkat biaya hidup antar-daerah dapat menyebabkan perbedaan kompensasi karyawan. Biaya hidup tinggi juga melahirkan tuntutan pekerja atas upah yang lebih tinggi pula. Untung menunjang biaya hidup yang layak, perusahaan yang mempekerjakan karyawan di daerah dengan tingkat biaya hidup tinggi umumnya memberikan gaji pokok.

2. Regulasi Pemerintah

UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan melarang perusahaan membayar upah karyawan lebih rendah dari upah minimum provinsi (UMP) dan upah kota/kabupaten (UMK)

3. Kompensasi Perusahaan Lain

Nilai kompensasi juga dipengaruhi oleh upah di perusahaan lain yang bergerak di sektor usaha yang sama. Karena itu, ini akan menjadi dasar menentukan seberapa besar perusahaan akan membayar imbalan karyawan.

4. Kemampuan Perusahaan

Perusahaan berskala besar atau punya reputasi bagus tentu bisa memberikan kompensasi yang besar bagi karyawannya.

5. Jenis Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Perusahaan merupakan sebuah bentuk organisasi bisnis yang menerapkan sistem pembagian kerja yang jelas dan terukur, jenis pekerjaan dan tanggung jawab.

6. Peranan Serikat Buruh

Kompensasi karyawan juga dipengaruhi oleh peran serikat buruh, terutama dalam perjanjian kerja bersama. Tuntutan atas tunjangan tertentu dari serikat buruh memungkinkan perusahaan memenuhinya.¹⁹

2.5. Hubungan Variabel-variabel Penelitian

2.5.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Karl E. Case & Ray C. Fair menjelaskan bahwa:

Pertumbuhan merupakan tujuan dasar masyarakat, karena pertumbuhan mengangkat orang keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Yang lain mengatakan pertumbuhan ekonomi mengikis nilai-nilai tradisional dan menyebabkan eksploitasi, kerusakan lingkungan, dan korupsi.²⁰

2.5.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran yaitu pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*).

Menurut Todaro dalam Seri Jefri Adil Waruwu:

¹⁹Mira Cahyaningtyas, **6 Faktor yang Menyebabkan Besar-Kecilnya Kompensasi Karyawan**, <http://www.gadjian.com/blog/2019/04/12/6-faktor-yang-mempengaruhi-besar-kecilnya-kompensasi-karyawan/>, 2019 (Diakses 15 November 2019)

²⁰Karl E. Case, & Ray C. Fair. **Op.Cithal**. 323

Ada hubungan erat antara tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang merajalela, dan ketidak merataan distribusi pendapatan. Sebagian besar didalamnya adalah mereka yang bekerja *part time*. Mereka yang bekerja secara tetap di sektor pemerintah dan swasta termasuk dalam kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Hal ini tidak bisa diartikan bahwa setiap orang yang tidak bekerja adalah miskin atau mereka yang bekerja “full time” relative berpenghasilan baik. Terdapat kemungkinan adanya penganggur yang menganggur secara sukarela serta kualifikasi kecakapan. Mereka menolak jenis pekerjaan yang tidak disukai dan hal ini mereka bisa menolak karena memiliki cukup sumber keuangan dari keluarga, teman atau pinjaman lainnya.²¹

2.5.3 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Penetapan upah minimum ditentukan oleh upah tahun berjalan dan pertumbuhan ekonominasional menurut PP No 78 tahun 2015. Sebelum PP No 78 tahun 2015 berlaku aturan UU No 13 tahun 2003 yang menetapkan upah minimum berdasar kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali oleh dewan pengupahan yang terdiri dari pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja buruh.

Gregory N. Mankiw menjelaskan upah minimum merupakan sumber perdebatan politik yang tidak ada habisnya.²²

2.6 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah di lakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang di lakukan oleh Seri Jefry Adil Waruwu dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995 – 2014. Penelitian ini menggunakan metode, OLS Data Panel.

Hasil Penelitian :

²¹Seri **Op.Cit.** Hal.63

²²G. Mankiew, **Teori Makro Ekonomi**, Jakarta: Erlangga, 2006, hal.162

1. **Variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan Terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2014.**
 2. **Variabel Pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2014.**
 3. **Variabel Belanja Pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2014.**
 4. **Variabel Investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2014.**²³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tania Octasari dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan metode, OLS.

Hasil Penelitian :

1. **Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2009-2013. Semakin tinggi tingkat PDRB suatu wilayah, maka akan semakin mengurangi pula jumlah penduduk miskin di Indonesia**
 2. **Variabel Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2009-2013. Penempatan upah minimum yang tidak hanya diterapkan pada lapangan kerja formal namun juga informal mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan jika disertai peningkatan upah minimum secara terus menerus akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan**
 3. **Variabel Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2009-2013.**²⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Matcher Halomoan Samosir dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja pemerintah, dan Investasi terhadap jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2000-2017. Penelitian ini menggunakan metode OLS.

Hasil penelitian :

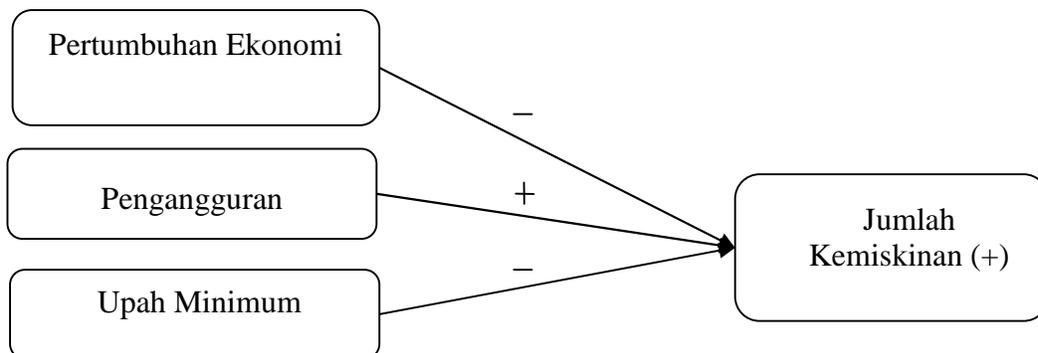
²³Seri **Op.Cit.** Hal.144

²⁴Tania Octasari, **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2009-2013**, hal.501, Journal.student.uny.ac.id (Jurnal diterbitkan)

1. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2000-2018.
2. Pengangguran memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2000-2018.
3. Belanja Pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2000-2018
4. Investasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2000-2018.
5. Berdasarkan Uji F, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah dan investasi secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2000-2018.²⁵

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Upah Minimum yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin). Setelah didapat tingkat signifikan setiap variabel bebas diharapkan mampu memberikan gambaran hubungan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Secara sederhana hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi indikator yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap tingkat penduduk miskin, maka diharapkan pendapatan nasional dapat menyebarkan secara merata kepada

²⁵Matcher H. Samosir, **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dan Investasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2000-2017**, Medan:FE,UHN,2019(Skripsi tidak diterbitkan)

seluruh lapisan masyarakat terutama untuk masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengangguran pada suatu daerah dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, tingkat pengangguran akan berdampak positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Upah yang makin tinggi yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan akan dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin.

2.8 Hipotesis Penelitian

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.
2. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.
3. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari (Badan Pusat Statistik). Data yang digunakan meliputi data kemiskinan Indonesia atau *poverty*, data pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka di Indonesia, dan data upah minimum setiap provinsi. Objek penelitian ini adalah kemiskinan dimana peneliti bermaksud untuk menganalisis pengaruh-pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam periode tahunan yaitu sejak kurun tahun 2000-2018.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPENAS dan yang dikumpulkan adalah meliputi data penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, data pengangguran, dan data upah minimum provinsi. Jangka waktu data yang digunakan adalah tahun 2000 sampai dengan 2018.

Jenis data adalah data *time series* (runtun waktu). Data *time series* adalah data yang menggambarkan suatu perkembangan dari waktu ke waktu atau periode secara historis.

3.3 Model Analisis

3.3.1 Model Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah teknik analisis yang akan menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian dengan menggunakan model regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda tersebut, adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{S}_0 + \hat{S}_1 X_1 + \hat{S}_2 X_2 + \hat{S}_3 X_3 + \epsilon_i; i = 1, 2, 3, \dots, n,$$

dimana:

Y = Jumlah penduduk miskin (juta jiwa).

\hat{S}_0 = Intersep

$\hat{S}_1, \hat{S}_2, \hat{S}_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Pertumbuhan ekonomi (%)

X_2 = Pengangguran terbuka (%)

X_3 = Upah Minimum (Rp)

ϵ_i = Galat (Error term)

3.3.2 Pengujian Hipotesis

3.3.2.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, upah minimum) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (kemiskinan), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata = 5%.

a) Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

$H_0: S_1 = 0$, artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

$H_1: S_1 < 0$, artinya ada pengaruh negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_{hitung} = \frac{\hat{S}_1 - S_1}{S(\hat{S}_1)}$$

koefisien regresi

S_1 : parameter

$S(\hat{S}_1)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan jumlah kemiskinan di Indonesia.

b) Pengangguran (X_2)

$H_0: S_2 = 0$ artinya, Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia

$H_1: S_2 > 0$ artinya, Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_h = \frac{\hat{S}_2 - S_2}{S(\hat{S}_2)}$$

\hat{S}_2 : koefisien regresi

S_2 : parameter

$S(\hat{S}_2)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Kemudian apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Pengangguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.

c. Upah Minimum (X_3)

$H_0: S_3 = 0$ artinya, upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia

$H_1 : S_3 < 0$ artinya, Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_h = \frac{\hat{S}_3 - S_3}{S(\hat{S}_3)}$$

\hat{S}_3 : koefisien regresi

S_3 : parameter

$S(\hat{S}_3)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya upah minimum secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Kemudian apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya upah minimum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.

3.3.2.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji “F” digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau tidak. Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut :

H_0 : $S_1 = S_2 = S_3 = 0$, $i = 1, 2, 3$, berarti variabel bebas secara serempak/bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

H_1 : β_i tidak semua nol, $i = 1, 2, 3$, berarti variabel bebas secara serempak/bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan dan df untuk *numerator* (k-1) dan df untuk *denominator* (n-k).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :
$$\frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 di tolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.3.2.3 Uji Kebaikan Suai : Koefisien Determinasi (R^2)

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel terikat dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model yang digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$; $R^2 \rightarrow 1$ artinya “semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.”²⁶

3.4 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.4.1 Multikolinieritas

²⁶ Agus Widarjono, **Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya**, Edisi 4, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2013, hal.26

Menurut Agus Widarjono "multikolinearitas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi berganda".²⁷ Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai $VIF \leq 10$ dan $Tol \geq 0.1$ maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas, namun bila sebaliknya $VIF \geq 10$ dan $Tol \leq 0.1$ maka dianggap ada pelanggaran multikolinearitas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks $> 0,95$ maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks $< 0,95$ maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi sekuensial antara sesama variabel bebas. Nilai R^2 sekuensial dibandingkan dengan nilai R^2 pada regresi model utama. Jika R^2 sekuensial lebih besar dari pada nilai R^2 pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

3.4.2 Autokorelasi

²⁷Ibid,hal.101

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode waktu t dengan galat pada periode waktu $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji:

1. Durbin Watson (uji D – W)

”Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*firstorder autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intersep (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen.”²⁸

Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis dL dan dU dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai n . Secara umum bisa diambil patokan :

1. $0 < d < dL$ Menolak hipotesis 0 (Ada Autokorelasi Positif)
2. $dL < d < dU$ Daerah Keragu-raguan (Tidak ada Keputusan)
3. $dU < d < 4 - dU$ Gagal Menolak Hipotesis 0 (Tidak Ada Autokorelasi) Positif / Negatif
4. $4 - dU < d < 4 - dL$ Daerah Keragu-raguan (Tidak ada Keputusan)
5. $4 - dL < d < 4$ Menolak Hipotesis 0 (Ada Autokorelasi Negatif)

2. Uji Run

²⁸ Imam Gozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23**, Edisi 8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hal.111

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. “Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).”²⁹ Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

H_0 : Galat (res_1) acak (random)

H_1 : Galat (res_1) tidak acak

3.4.3 Uji Normalitas

Sesuai teorema Gauss Markov :

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \varepsilon_i$$

1. $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ Apakah galat (distribusi error) menyebar normal atau tidak
2. tidak terjadi autokorelasi.

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. “Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.”³⁰ untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan

²⁹ **Ibid**, hal.120

³⁰ **Ibid**, hal.160

melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

2. Analisis Statistik

Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan melihat nilai kemencengan atau penjururan (*skewness*) dan keruncingan (*kurtosis*) dari sebaran galat. Menurut Ghozali nilai Z statistik untuk kemencengan dan nilai z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut :

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\frac{6}{n}} \text{ dan } Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\frac{24}{n}}, \text{ dimana } n \text{ adalah ukuran sampel.}$$

Menurut Ghozali untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik nonparametrik Kolmogrof-Smirnov (K-S).³¹ Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Data galat (residu) menyebar normal

H_1 : Data galat tidak menyebar normal.

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Miskin (Y)

Jumlah Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jumlah

³¹Ibid, hal. 164

kemiskinan, yaitu jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018 satuan data adalah juta orang.

2. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Data yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000-2018. Pertumbuhan ekonomi dihitung dalam satuan persen.

3. Pengangguran Terbuka (X2)

Pengangguran Terbuka adalah orang yang termasuk dalam kelompok usia angkatan kerja mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkannya. Data yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2000-2018. Pengangguran terbuka di hitung dalam satuan persen.

4. Upah Minimum (X3)

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Data yang digunakan adalah rata-rata upah minimum setiap provinsi di Indonesia tahun 2000-2018. Upah minimum dihitung dalam satuan rupiah.